



DATIN 2016

Laporan Data & Informasi

Capaian Pembangunan
Kota Banda Aceh

2011-2015

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pemerintah Kota Banda Aceh
Tahun 2016





KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT dan shalawat kita sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, Laporan yang berjudul *"Data dan Informasi Kinerja Pembangunan 2011-2015 Kota Banda Aceh"* ini telah selesai, laporan yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh ini merupakan rangkuman kinerja pembangunan Kota Banda Aceh selama kurun waktu 5 (lima) Tahun. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Indonesia, Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, UNDP serta sumber lainnya yang resmi.

Buku ini dibuat untuk melihat kinerja pembangunan Kota Banda Aceh melalui informasi data, angka, serta grafik. Di balik angka dan grafik yang tersaji tergambarkan perjalanan pembangunan Kota Banda Aceh selama 5 (lima) tahun. Jika dibandingkan data antara Tahun 2011 dan 2015, maka secara umum dapat dikatakan bahwa terdapat kemajuan dan peningkatan yang berarti dalam segala bidang, khususnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Banda Aceh.

Dengan melihat data dan informasi yang tersaji dalam laporan ini, diharapkan kita dapat lebih tajam dalam merumuskan perencanaan pembangunan kedepan, serta dapat menjadi pembelajaran dalam tahap pembangunan berikutnya.

Tentunya banyak kekurangan yang akan ditemukan, hal ini tidak lepas dari kekurangan kami selaku manusia yang tidak luput dari kesalahan. Untuk itu kami sangat memerlukan saran dan masukan yang membangun demi kesempurnaan laporan ini.

Akhirnya, kami memohon semoga Allah SWT memberi pahala kebaikan kepada rekan-rekan yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan buku ini. Amin

Banda Aceh, Agustus 2016
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Banda Aceh

ISKANDAR, S.Sos,M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar danTabel	iii

BAB 1

KINERJA PEMBANGUNAN & PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

1

1.1 Perkembangan Ekonomi Makro	1
1.2 Perbandingan Antar Daerah	6

BAB 2

KINERJA PEMBANGUNAN MENURUT BIDANG

8

2.1 Pelaksanaan Syariat Islam	9
2.2 Tata Kelola Pemerintahan	10
2.3 Ekonomi Kerakyatan	16
2.4 Pendidikan	15
2.5 Kesehatan	16
2.6 Infrastruktur	18
2.7 Pariwisata	21
2.8 Pengarusutamaan Gender	22

BAB 3

PRESTASI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH 2011-2015

23

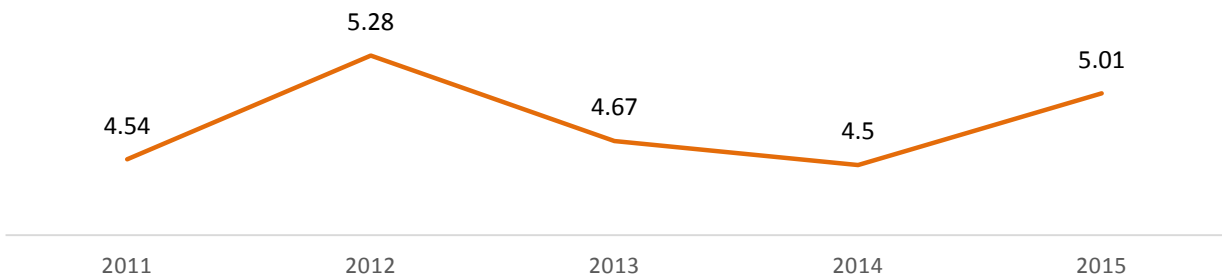
3.1 Tingkat Nasional	23
3.2 Tingkat Provinsi	23

DAFTAR GAMBAR & TABEL

Gambar 1.1.1	Pertumbuhan Ekonomi Kota Banda Aceh Tahun 2009-2013	1
Gambar 1.1.2	Struktur Produk Domestik Regional Bruto Kota Banda Aceh Tahun 2014 (%)	1
Gambar 1.1.3	Inflasi di Kota Banda Aceh Tahun 2008-2014	2
Gambar 1.1.4	Pendapatan Perkapita Kota Banda Aceh Tahun 2009-2014	2
Gambar 1.1.5	Komposisi Anggaran Belanja Kota Banda Aceh Tahun 2010-2015	3
Gambar 1.1.6	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh Tahun 2010- 2014	3
Gambar 1.1.7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Banda Aceh Tahun 2011-2014	4
Gambar 1.1.8	Komponen Penyusun IPM Kota Banda Aceh Tahun 2011-2014	4
Gambar 1.1.9	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kota Banda Aceh Tahun 2010-2014	5
Gambar 1.1.10	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banda Aceh Tahun 2010-2014	5
Gambar 1.2.1	Perbandingan Inflasi di Pulau Sumatera Tahun 2014	6
Gambar 1.2.2	Perbandingan PDRB Perkapita antara Kota Banda Aceh dan ke-33 ibukota provinsi lainnya di Indonesia Tahun 2014	6
Gambar 1.2.3	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara Kota Banda Aceh dan kab/kota di Indonesia Tahun 2014	7
Gambar 1.2.4	Perbandingan Angka Harapan Hidup (AHH) Penduduk antara Kota Banda Aceh dan negara-negara di dunia Tahun 2014	7
Gambar 2.1.1	Pemberantasan Aliran Sesat di Kota Banda Aceh Tahun 2011-2015.....	8
Gambar 2.1.2	Jumlah kasus Pelanggaran Qanun Syariat Islam di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2015...	8
Gambar 2.1.3	Kemampuan baca Al-Qur'an siswa tingkat sekolah menengah Tahun 2012-2015	9
Gambar 2.1.4	Jumlah Penerimaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di Baitul Mal Kota Banda Aceh dan Jumlah Muzzakki Tahun 2012-2015.....	9
Gambar 2.2.1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS Kota Banda Aceh Tahun 2009-2013	10
Gambar 2.2.2	Komposisi PNS berdasarkan Pendidikan, Juli 2016	10
Gambar 2.2.3	Nilai Indeks e-government Kota Banda Aceh Tahun 2014-2015	11
Gambar 2.2.4	Nilai Indeks Persepsi Korupsi Kota Banda Aceh	11
Gambar 2.2.5	Anggota DPRK Banda Aceh Periode 2009-2014 dan 2014-2019 berdasarkan pendidikan pada saat pelantikan	12
Gambar 2.2.6	Perbandingan Jumlah Rancangan Qanun yang diajukan dan Qanun yang disahkan oleh DPRK Banda Aceh Tahun 2012-2015.....	12
Gambar 2.3.1	Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Banda Aceh Tahun 2011-2014.....	13
Gambar 2.3.2	Nilai Produksi Usaha Perikanan di Kota Banda Aceh Tahun 2013-2014	13
Gambar 2.3.3	Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional di Kota Banda Aceh Tahun 2013-2015 (milyar)	14
Gambar 2.4.1	Persentase Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur Sekolah di Kota Banda Aceh Tahun 2013-2014	15

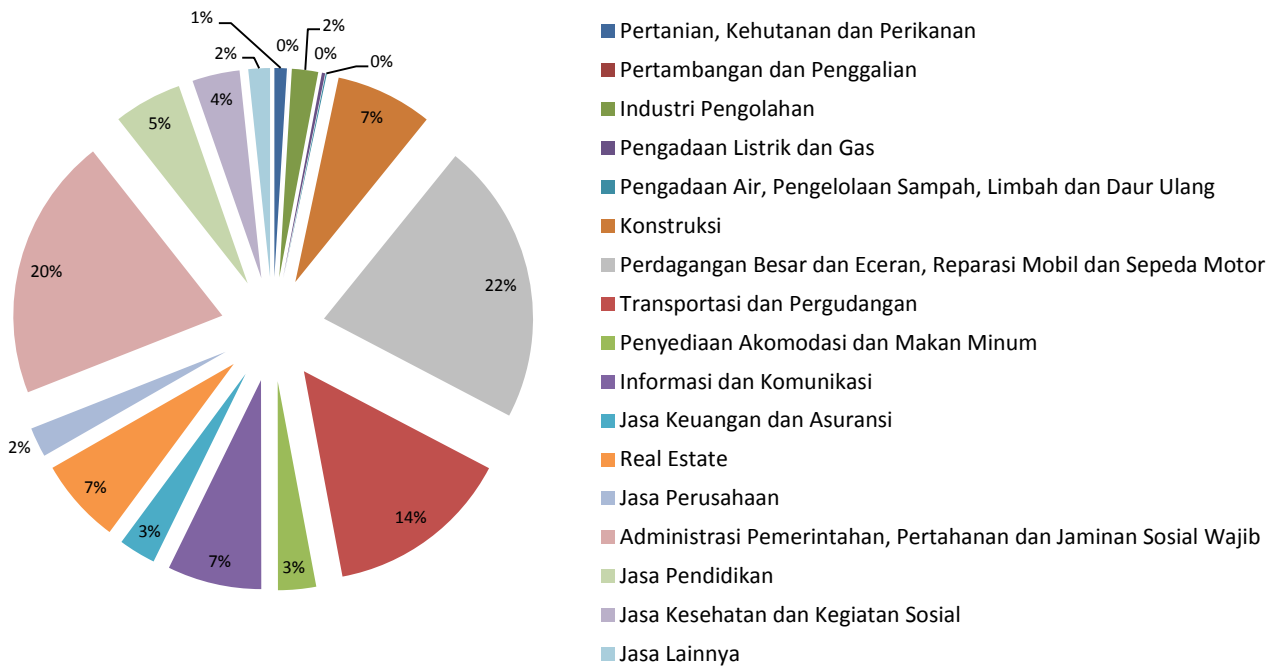
Gambar 2.4.2	Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah dan Putus Sekolah Kota Banda Aceh 2011-2015	15
Gambar 2.5.1	Jumlah Kunjungan Pasien Askes, Umum, Jamkesmas dan JKA di Kota Banda Aceh Tahun 2011-2014.....	16
Gambar 2.5.2	Jumlah Puskesmas yang sudah menerapkan e-health dan jumlah Puskesmas yang bersertifikasi ISO/akreditasi di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2015.....	16
Gambar 2.5.3	Jumlah Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Banda Aceh pada Tahun 2012-2015.....	17
Gambar 2.5.4	Jumlah kasus HIV-AIDS di Kota BandaAceh Tahun 2009-2013.....	17
Gambar 2.6.1	Panjang Jalan Nasional/Propinsi/Kota dan perkembangan Jalan dalam Kondisi Baik Kota Banda Aceh Tahun 2011-2015	18
Gambar 2.6.2	Rasio Rumah Tinggal berakses sanitasi dan Rumah Tangga yang menempati Rumah Sehat Kota Banda Aceh Tahun 2009-2013	18
Gambar 2.6.3	Jumlah Total Kendaraan dan Data Kendaraan di Kota Banda Aceh Tahun 2011-2015.....	19
Gambar 2.6.4	Rasio panjang Jalan per Jumlah Kendaraan dan Angka Kecelakaan Lalu Lintas Kota Banda Aceh Tahun 2009-2013	19
Gambar 2.6.5	Cakupan Pelayanan Persampahan (persentase penduduk terlayani) Kota Banda Aceh 2011-2015	20
Gambar 2.6.6	Cakupan Pelayanan Air Bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh 2009-2013	20
Gambar 2.7.1	Jumlah Hunian Wisata Mancanegara dan Domestic Kota Banda Aceh Tahun 2011-2015.	21
Gambar 2.7.2	Banyaknya Kunjungan Wisatawan di Objek Pariwisata yang paling di kunjungi di Kota Banda Aceh Tahun 2014	21
Gambar 2.8.1	Indeks Pembangunan Gender di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014	22
Gambar 2.8.2	Banyaknya Kunjungan Wisatawan di Objek Pariwisata yang paling di kunjungi di Kota Banda Aceh Tahun 2014	22

Gambar 1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Banda Aceh Tahun 2011-2015



Sumber : Banda Aceh Dalam Angka Tahun 2016

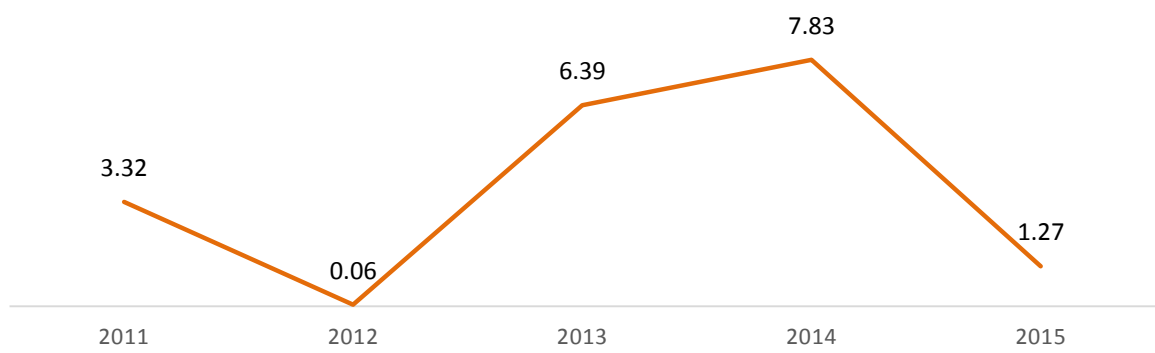
Gambar 1.1.2 Struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Banda Aceh Tahun 2015 (%)



Sumber : Banda Aceh Dalam Angka Tahun 2016

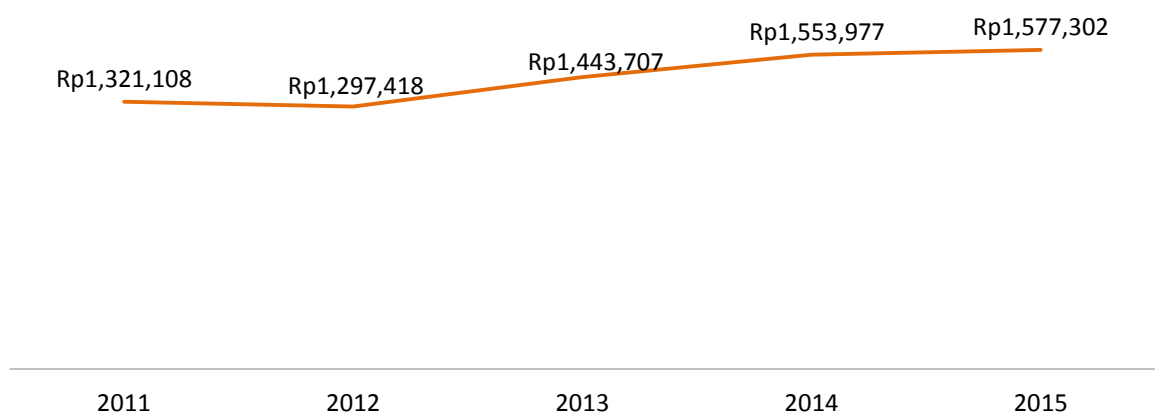
- Setelah sempat mengalami perlambatan dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Kota Banda Aceh pada Tahun 2015 mulai membaik atau meningkat 0,51 persen dibandingkan Tahun 2014, hal ini ditunjang dengan adanya geliat pertumbuhan kegiatan ekonomi pada sektor konstruksi, yang tumbuh sebesar 0.45 poin dan real estate 0.51 poin.
- PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian diseluruh daerah dalam satu tahun. Berdasarkan struktur PDRB, maka dapat diketahui peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sebagai Kota jasa sekaligus Ibukota Provinsi, pada Tahun 2015, Struktur PDRB di Kota Banda Aceh didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang menyumbang 21,86 persen dan diikuti oleh sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 20,36 persen.

Gambar 1.1.3 Inflasi di Kota Banda Aceh Tahun 2011-2015



Sumber : Banda Aceh Dalam Angka Tahun 2016

Gambar 1.1.4 Pengeluaran Perkapita per bulan di Kota Banda Aceh pada Tahun 2011-2015



Sumber : Banda Aceh Dalam Angka Tahun 2016

- Inflasi menjadi tolok ukur kestabilan perekonomian di suatu daerah. Angka inflasi juga dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat tingkat daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa terutama lapisan masyarakat berpenghasilan tetap. Inflasi terus menerus dapat mengakibatkan kenaikan harga barang dan menurunnya nilai mata uang, dan sebaliknya deflasi terus menerus dapat mengakibatkan resesi dan kelesuan perekonomian. Untuk Kota Banda Aceh, nilai inflasi terlihat sangat fluktuatif, dimana pada tahun 2012, laju inflasi 0,06 persen atau mendekati terjadinya deflasi, tahun 2013 terdongkrak naik ke level 6,39 persen disebabkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada pertengahan Juni tahun 2013, kemudian Inflasi yang lebih besar terjadi di tahun 2014 (7,83%) dan lagi-lagi disebabkan oleh kenaikan BBM. Akan tetapi di Tahun 2015 angka inflasi jauh menurun, yakni 1,27 persen yang menunjukkan tidak adanya kenaikan harga barang yang berarti pada tahun tersebut atau rata-rata harga barang di akhir tahun 2015 hanya 1,27 persen lebih mahal dibandingkan awal tahun 2015.
- Rata-rata pengeluaran perkapita atau belanja rumah tangga selama sebulan di Kota Banda Aceh terus mengalami peningkatan (Tahun 2015 : Rp 1.577.302,-). Hal ini menunjukkan daya beli masyarakat Kota Banda Aceh semakin meningkat, bahkan melampaui rata-rata Provinsi (Tahun 2015 : Rp 752.118,-) dan Nasional (Rata-rata pengeluaran perkapita di daerah Perkotaan Tahun 2015 : Rp 1.074.664,-) semakin mengindikasikan perekonomian di Kota Banda Aceh menjadi semakin baik.

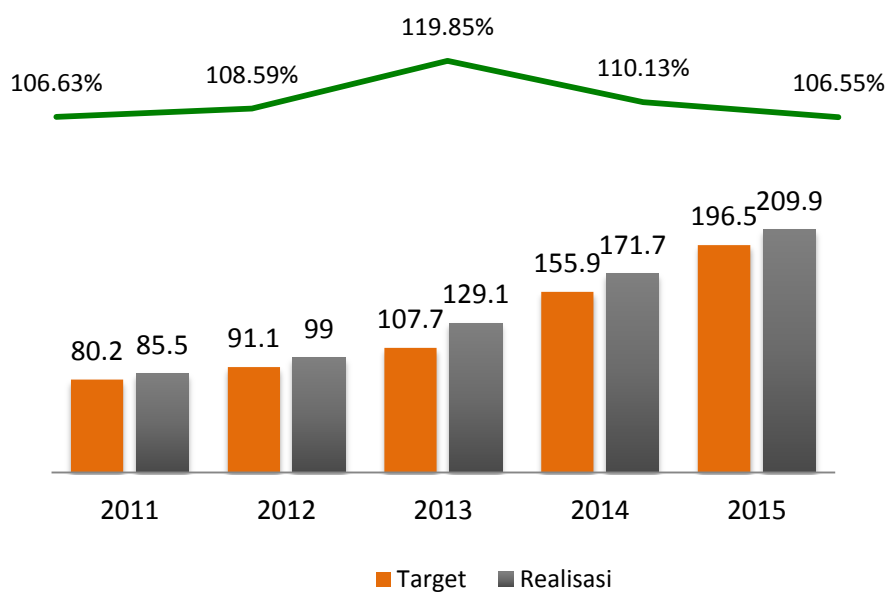
Rata-rata pengeluaran perkapita di Kota Banda Aceh Tahun 2015 : Rp 1.577.302,- melampaui rata-rata Provinsi Aceh (Rp 752.118,-) dan Nasional (Rp 1.074.664,-)

Gambar 1.1.5 Komposisi Anggaran Belanja Kota Banda Aceh Tahun 2011-2015

TAHUN	BELANJA	APARATUR	%	PUBLIK	%
2011	714.4 M	482.2 M	68	232.1 M	32
2012	765.4 M	498.1 M	65	267.2 M	35
2013	905.8 M	519.6 M	57	386.1 M	43
2014	1,09 T	568.9 M	52	527.2M	48
2015	1,16 T	536,8 M	47	592,9 M	53

Sumber : KUA - PPAS Kota Banda Aceh, 2016

Gambar 1.1.6 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh Tahun 2010-2014

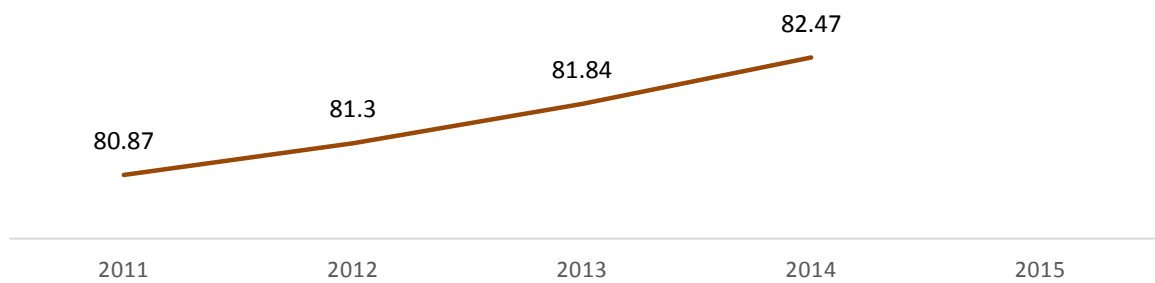


Sumber : Banda Aceh Dalam Angka Tahun 2016

- APBD merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat, melalui APBD dapat dilihat apakah pembangunan di suatu daerah pro rakyat atau tidak. Dari tahun ke tahun Pemerintah Kota Banda Aceh telah mampu meningkatkan persentase belanja public menjadi lebih besar yakni dari 32% pada Tahun 2011 menjadi 53% pada tahun 2015.
- PAD Kota Banda Aceh terus melampaui target, yakni 106,63% pada Tahun 2011 dan menjadi 106,55% pada Tahun 2015. Sumber PAD terbesar adalah Retribusi Daerah dengan realisasi sebesar Rp 154,1 M, diikuti oleh Lain-lain PAD yang sah (Rp 115,8 M), Pajak Daerah (Rp 51,5 M), Zakat (Rp 17,7 M), Retribusi Jasa Usaha (Rp 6,2 M), Retribusi Perizinan Tertentu (Rp 2,9 M) dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan (Rp 1,05 M)

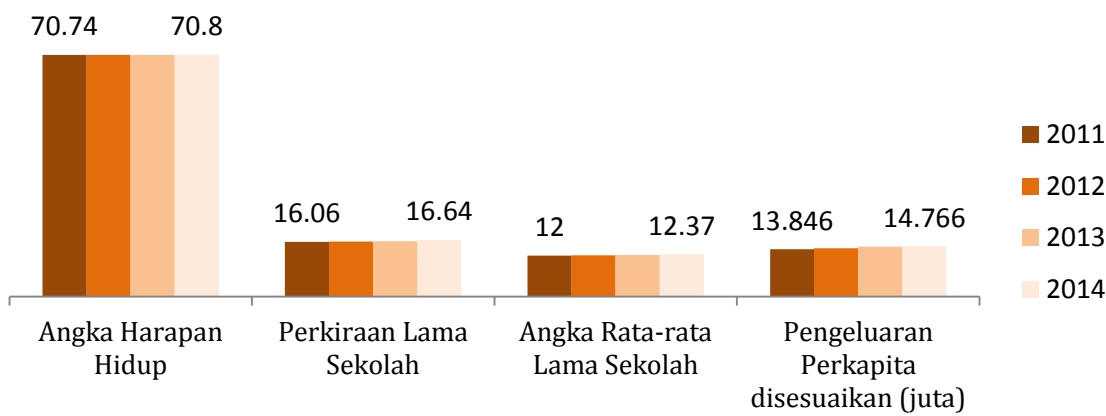
Dari tahun ke tahun Pemerintah Kota Banda Aceh telah mampu meningkatkan persentase belanja public menjadi lebih besar yakni dari 32% pada Tahun 2010 menjadi 53% pada tahun 2015

Gambar 1.1.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Banda Aceh 2011-2015



Sumber : Banda Aceh Dalam Angka Tahun 2016

Gambar 1.1.8 Komponen Penyusun IPM Kota Banda Aceh 2011-2014



Sumber : Banda Aceh Dalam Angka Tahun 2016

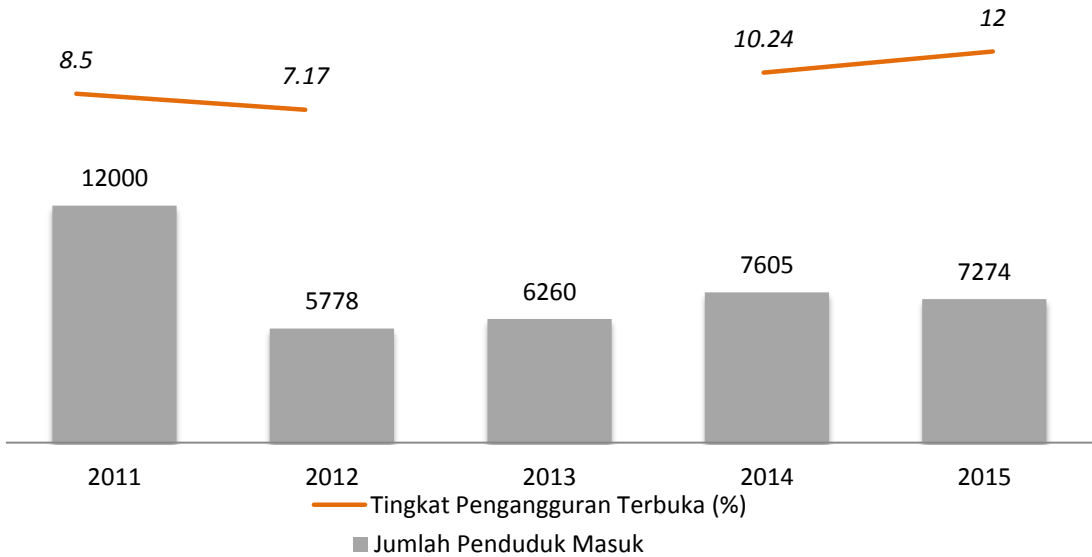
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/Negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) (Sumber :www.bps.go.id). IPM Kota Banda Aceh terus meningkat menjadi 82,47 jauh melampaui IPM Provinsi Aceh (Tahun 2014 : 68,81) dan Nasional (Tahun 2014 : 68,9)
- IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yakni Umur panjang dan hidup sehat, Pengetahuan dan Standar hidup layak (Sumber :www.bps.go.id). Ketiga komponen di atas telah dicapai dengan baik oleh Kota Banda Aceh. Dimana Angka Harapan Hidup 70,8 th (Standar Max UNDP : 85 th), Angka Rata-rata Lama Sekolah 12,37 th (Standar Max UNDP : 15 th) dan Pengeluaran Perkapita 14,766 Juta per tahun.

Gambar 1.1.9 Perbandingan Pengeluaran Perkapita perbulan dan Garis Kemiskinan di Kota Banda Aceh Tahun 2010-2014

URAIAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
Penduduk Miskin	Ribu Jiwa	20,84	20,39	19,42	19,42	-
Penduduk Miskin	%	9,08	8,65	8,03	7,78	-
Garis Kemiskinan	Rp	477.669	485.543	493.588	500.768	-

Sumber : Banda Aceh Dalam Angka Tahun 2016

Gambar 1.1.10 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banda Aceh tahun 2010-2014

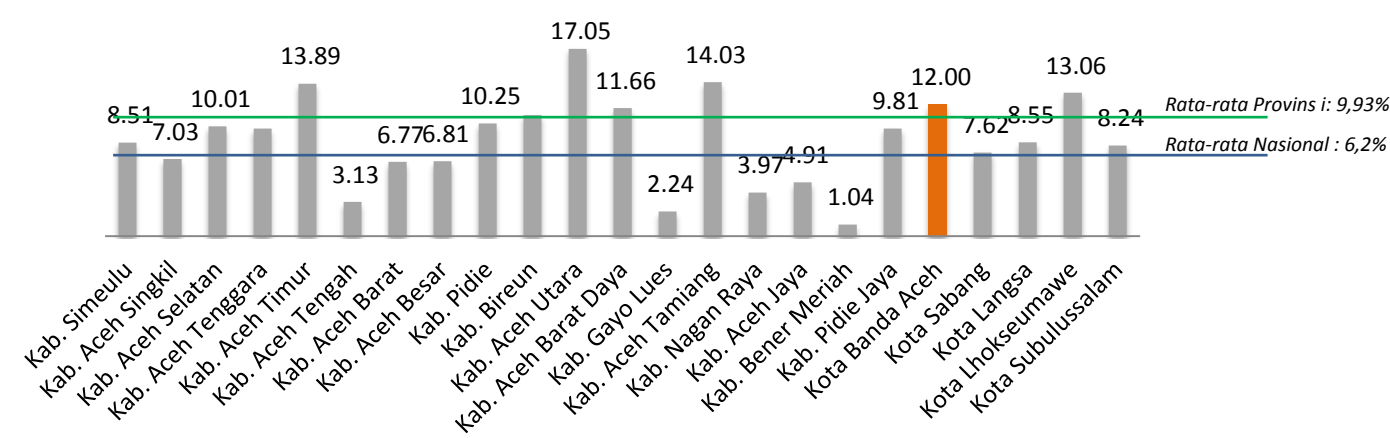


Sumber : Banda Aceh Dalam Angka Tahun 2016

- Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan data BPS Kota Banda Aceh, penduduk miskin di Kota Banda Aceh Tahun 2013 adalah 19.400 jiwa, dan tidak ada penambahan penduduk miskin di Kota Banda Aceh pada Tahun 2014, akan tetapi dengan adanya penambahan jumlah penduduk, sehingga persentase penduduk miskin menjadi berkurang 0,25% pada Tahun 2014 menjadi 7,78%. Sementara garis kemiskinan menjadi Rp 500.768,- pada tahun 2014 yang menunjukkan kenaikan harga yang harus dibayar oleh penduduk miskin untuk memenuhi pengeluaran kebutuhan minimum yang disetarakan dengan 2100 kalori perkapita perhari dan memenuhi kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.
- Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Banda Aceh meningkat menjadi 12% pada Tahun 2015 (13.888 orang), atau meningkat 2.413 orang dari tahun 2014. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banda Aceh lebih tinggi dari Provinsi Aceh (Tahun 2015: 9,93%) dan lebih tinggi dari Nasional (Tahun 2015: 6,2%). Dibandingkan dengan jumlah penduduk masuk pada dari Tahun 2011 (12.000 orang) ke Tahun 2015 (7.274) yang justru menurun, maka faktor migrasi penduduk ke Kota Banda Aceh bukanlah penyebab utama tingginya tingkat pengangguran di Banda Aceh. Kurang tersedianya lapangan pekerjaan dan melambatnya perekonomian secara nasional, menjadi faktor pendukung tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kota Banda Aceh.

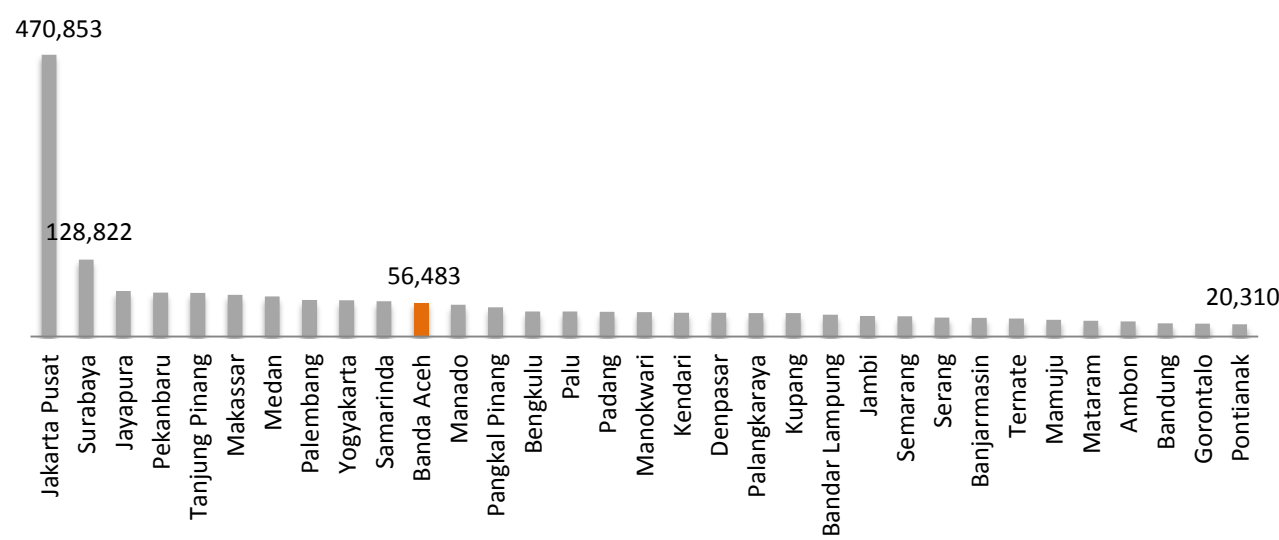
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banda Aceh pada Tahun 2015 : 12% lebih tinggi dari Provinsi Aceh (Tahun 2015 : 9,93% yang merupakan Angka Pengangguran tertinggi di Indonesia) dan lebih tinggi dari Nasional (Tahun 2015 : 6,2%)
Sumber Data : Badan Statistik Indonesia Tahun 2016

Gambar 1.2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota di Provinsi Aceh, Tahun 2015



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh 2015

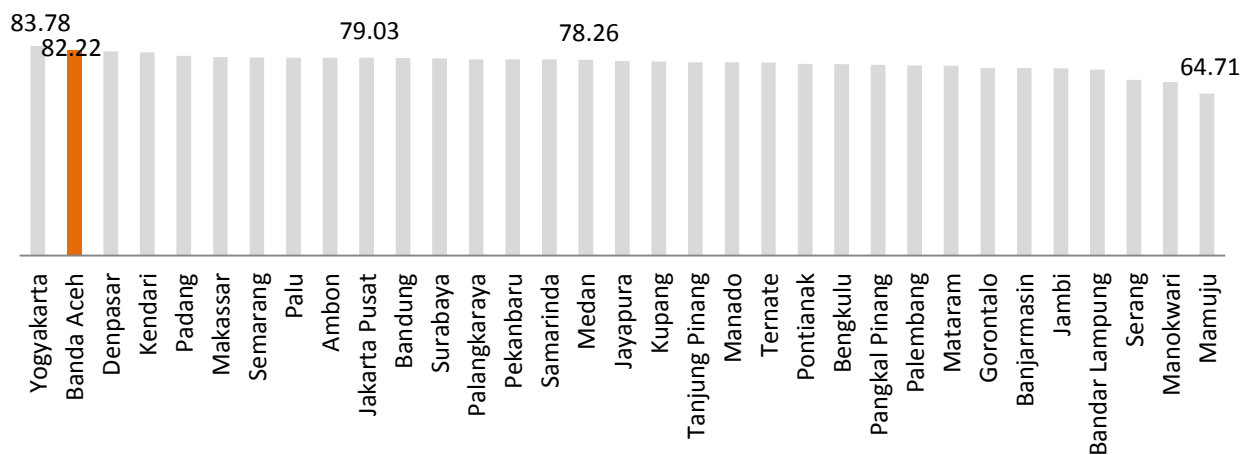
Gambar 1.2.2 Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Perkapita antara Kota Banda Aceh dan ke-33 ibukota provinsi lainnya di Indonesia Tahun 2014



Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kab/Kota di Indonesia, 2010-2014, Badan Pusat Statistik Indonesia 2015

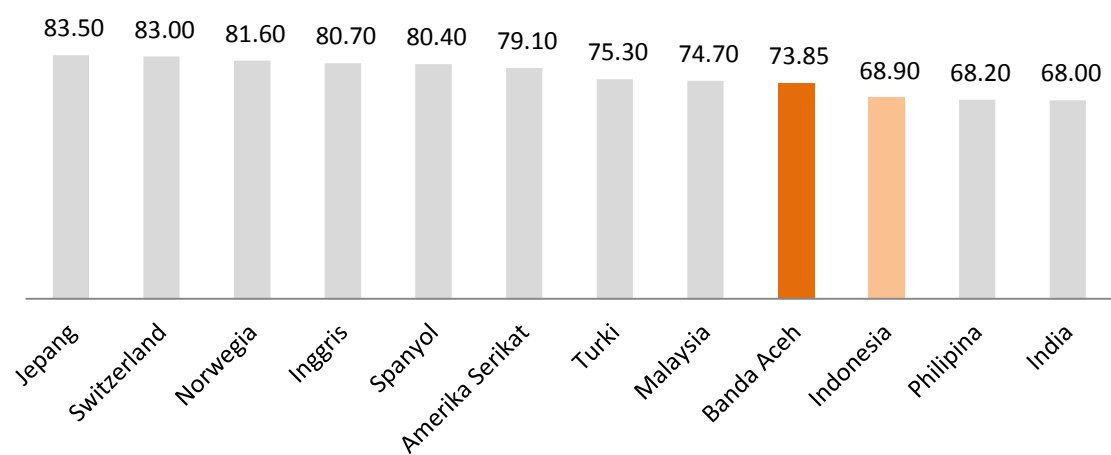
- Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Aceh, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banda Aceh pada Tahun 2015 termasuk lima tertinggi (12,00%), meskipun masih dibawah Kabupaten Aceh Utara (17,05%), Kabupaten Aceh Tamiang (14,00%), Kabupaten Aceh Timur (13,89%), dan Kota Lhokseumawe (13,06%)
- Dari Gambar 1.3.2 dapat dilihat bahwa, secara nasional, Perbandingan PDRB perkapita (ADHB) antara Kota Banda Aceh dan ibukota provinsi lainnya di Indonesia untuk Tahun 2014, berada di urutan ke-11 dari 34 ibukota di Indonesia, di atas Kota Semarang dan lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Aceh (Rp 26.585.000,-) dan Nasional (Rp 23.900.000,-). Akan tetapi jauh dari PDRB ADHB Perkapita Jakarta Pusat yang mencapai Rp 470.853.000,-pada tahun 2014.

Gambar 1.2.3 Perbandingan IPM antara Kota Banda Aceh dan ke-33 ibukota provinsi lainnya di Indonesia Tahun 2014



Sumber : Indeks Pembangunan Manusia 2014 Metode Baru, Badan Pusat Statistik Indonesia 2015

Gambar 1.2.4 Perbandingan AHH antara Kota Banda Aceh dan negara-negara di dunia Tahun 2014



Sumber : Indeks Pembangunan Manusia 2014 Metode Baru, Badan Pusat Statistik Indonesia 2015 dan Human Development Report 2015, UNDP

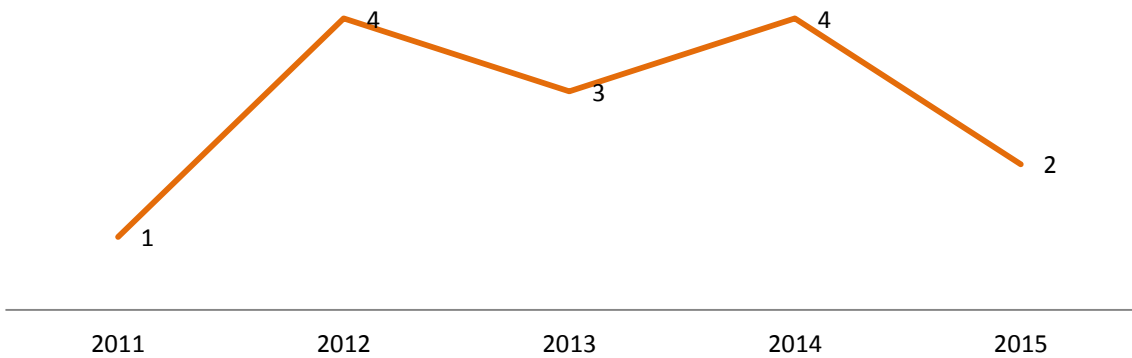
- IPM Kota Banda Aceh Tahun 2014, menempati posisi ke-2(82,22) setelah Yogyakarta (83,78) dari ke-34 ibukota Provinsi di Indonesia. Berada di atas Jakarta Pusat (79,03) dan Kota Medan (78,26). Menunjukkan bahwa tingkat kualitas hidup masyarakat Kota Banda Aceh dalam hal pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan telah sangat baik.
- Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indicator dalam menentukan tingkat kesehatan suatu daerah, semakin tinggi AHH semakin baik tingkat kesehatan di daerah tersebut. Jika dibandingkan dengan Negara-negara lain, AHH Kota Banda Aceh lebih baik daripada AHH Negara India, Philipina bahkan Indonesia. Jepang memiliki AHH tertinggi yaitu 83,50 tahun.

Angka IPM Indonesia menempati urutan ke 110 dari 188 negara, berdekatan dengan Mesir (108), Paraguay (112), Palestina (113), Uzbekistan (114), dan Filipina (115)

Sumber Data : Human Development Report 2015, UNDP

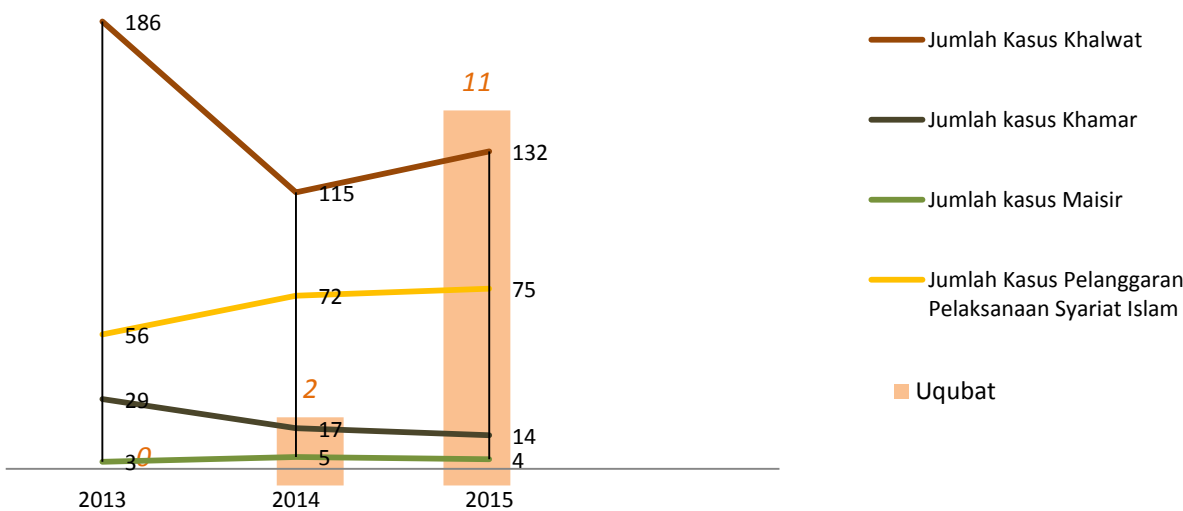
5,4% (Rp 29,1 M)
dari total Belanja Langsung APBK Banda Aceh T.A 2015

Gambar 2.1.1 Pemberantasan Aliran Sesat di Kota Banda Aceh Tahun 2011-2015



Sumber : Dinas Syari’at Islam Kota Banda Aceh, 2016

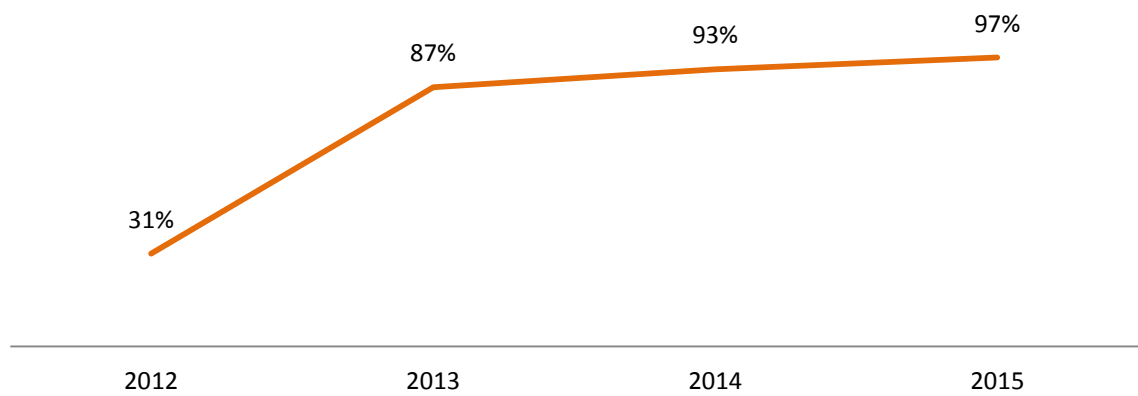
Gambar 2.1.2 Jumlah kasus pelanggaran qanun Syari’at Islam di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2015



Sumber : Expose Satuan Polisi & Pamong Praja Kota Banda Aceh, Feb 2016

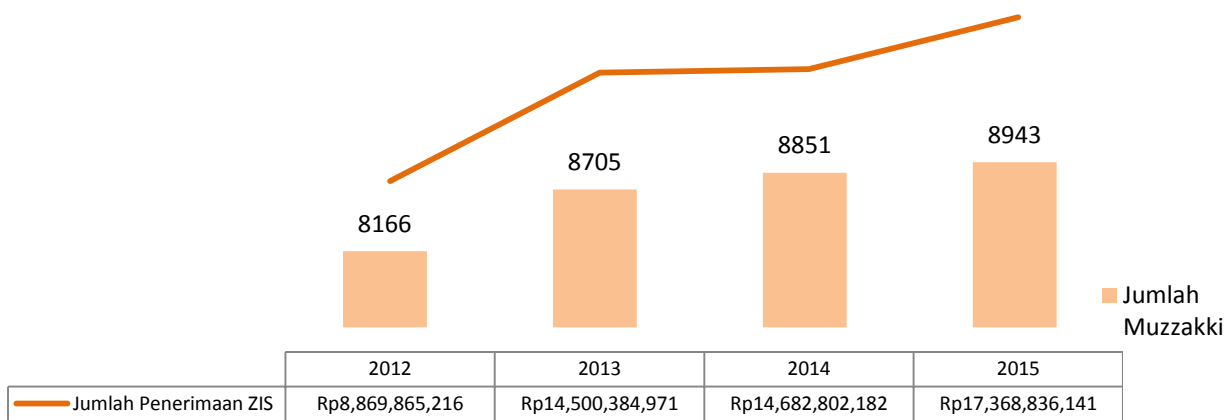
- Hasil identifikasi Tim Penegakan Syariat Islam Kota Banda Aceh pada Tahun 2012, Millata Abraham, Syi’ah, LDII dan Suluk (Lampaseh) terindikasi sebagai aliran sesat. Jumlah aliran sesat mengalami penurunan hingga di Tahun 2015 tersisa 2 aliran yang terindikasi sesat, yakni Gafatar yang merupakan transformasi dari Millata Abraham yang sempat menyebarkan alirannya di Kota Banda Aceh Tahun 2011 dan Syi’ah.
- Dari Gambar 2.1.2 dapat dilihat bahwa jumlah kasus pelanggaran qanun Syari’at Islam yang tertinggi di Kota Banda Aceh selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah kasus Khalwat yakni berada di atas 100 kasus, sedangkan kasus pelanggaran pelaksanaan syariat islam, bidang aqidah, ibadah dan syiar Islam yang meningkat dari tahun 2013, 56 kasus menjadi 75 kasus pada tahun 2017. Pelaksanaan uqubat meningkat, yakni dari tidak ada pelaksanaan uqubat pada tahun 2013 menjadi 11 kali pelaksanaan uqubat pada tahun 2015. Hal ini tentu menjadi keprihatinan dan Pemerintah Kota Banda Aceh diharapkan dapat menekan seminimal mungkin angka pelanggaran syariat islam melalui penerapan kebijakan, sosialisasi, penegakan hukum sesuai Qanun syariat islam serta membangun komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Gambar 2.1.3 Kemampuan baca Al-quran siswa tingkat sekolah menengah Tahun 2012-2015



Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh, 2016

Gambar 2.1.4 Jumlah Penerimaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di Baitul Mal Kota Banda Aceh dan Jumlah Muzzakki Tahun 2012-2015

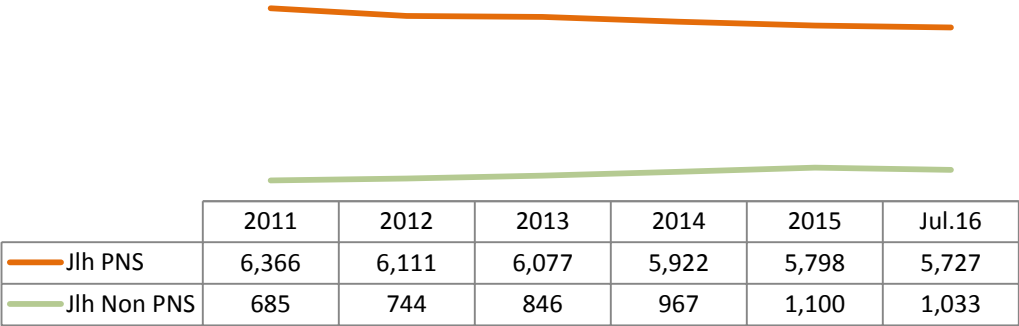


Sumber : Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2016

- Dapat dilihat dari Gambar 2.1.3 Kemampuan baca Al-quran siswa tingkat sekolah menengah Tahun 2012-2015 di atas bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh melalui penerapan program diniyah pada sekolah menengah menargetkan peningkatan kemampuan baca Al-quran bagi 97% jumlah siswa sekolah. Dari total siswa sekolah menengah sebanyak 12.445 siswa,sebanyak 12.070 siswa mampu baca Al-quran secara benar dan baik. Pencapaian target ini didukung melalui adanya persyaratan masuk sekolah menengah di Kota Banda Aceh yang harus melampirkan sertifikat diniyah bagi siswa dari lingkup sekolah Kota Banda Aceh dan adanya tes baca quran bagi siswa dari luar lingkup sekolah Kota Banda Aceh.
- Jumlah Penerimaan dan Penyaluran ZIS pada Baitul Mal Kota Banda Aceh terus mengalami peningkatan, dari Tahun 2012, penerimaan ZIS Rp 8.869.865.216,- (dari 8.166 muzzakki) meningkat menjadi Rp 17.368.836.141,- (dari 8.943 muzzakki) pada Tahun 2015.

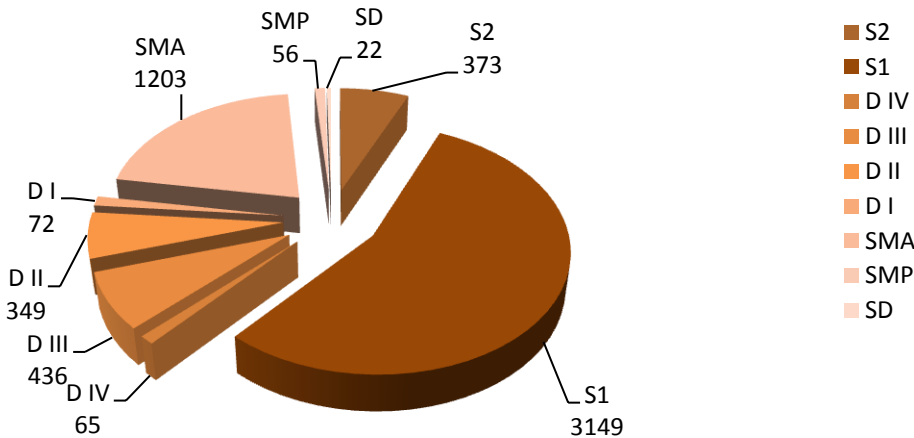
35,7%(Rp 191,4 M)
dari total Belanja Langsung APBK Banda Aceh T.A 2015

Gambar 2.2.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2011-Juli 2016



Sumber : <http://bkpp.bandaacehkota.go.id>, Juli 2016

Gambar 2.2.2 Komposisi PNS berdasarkan Pendidikan, Juli 2016

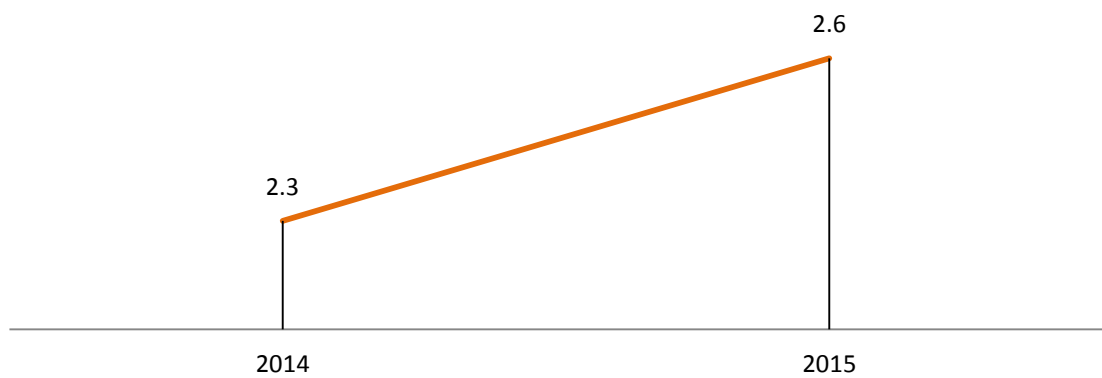


Sumber : <http://bkpp.bandaacehkota.go.id>, Juli 2016

- Moratorium penerimaan PNS Kota Banda Aceh yang telah dilakukan sejak Tahun 2007 dan pembatasan perpindahan pegawai ke Kota Banda Aceh menyebabkan jumlah PNS Kota Banda Aceh terus menurun, hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Belanja ke Sektor Publik. Tahun 2011 jumlah PNS Kota Banda Aceh 6.366 dan terus menurun menjadi 5.727 pada Tahun 2015. Meskipun demikian, Pemerintah Kota Banda tetap merekrut tenaga Non PNS, yang terus meningkat dari Tahun 2011 : 685 orang menjadi 1.033 orang pada 31 Mei 2016.
- Pada tahun 2016, 58,74% (3.479 orang) PNS Kota Banda Aceh berpendidikan Sarjana S-1 dan S-2, 18,69% (1.107 orang) Diploma dan 22% (1.336 orang) adalah SMA, SMP dan SD.

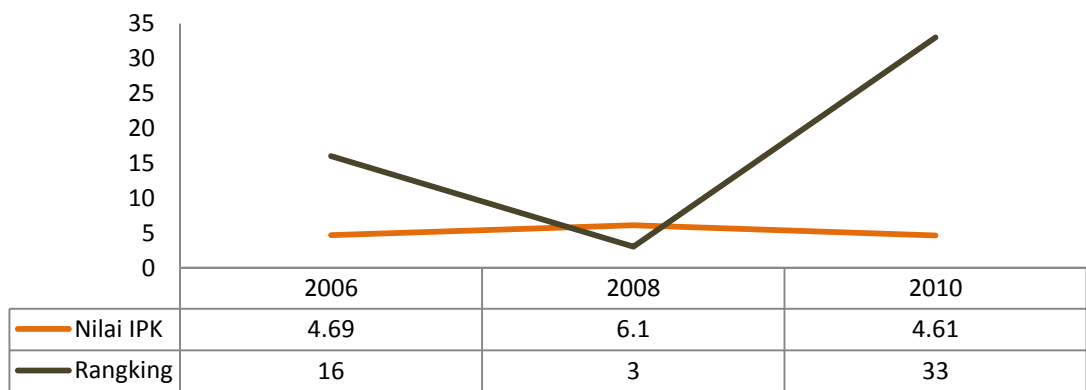
Jumlah PNS Kota Banda Aceh didominasi oleh wanita (67%). Meskipun demikian, 40% (237 orang) dari 606 posisi pejabat Eselon II sd IV di isi oleh laki-laki (369 orang atau 60%)

Gambar 2.2.3 Nilai Indeks e-government Kota Banda Aceh Tahun 2014-2015



Sumber : <http://pegilayanan.go.id/>, Pemeringkatan e-Gov Indonesia, Direktorat e-Gov Ditjen APTIKA Kemkominfo RI

Gambar 2.2.4 Nilai Indeks Persepsi Korupsi Kota Banda Aceh

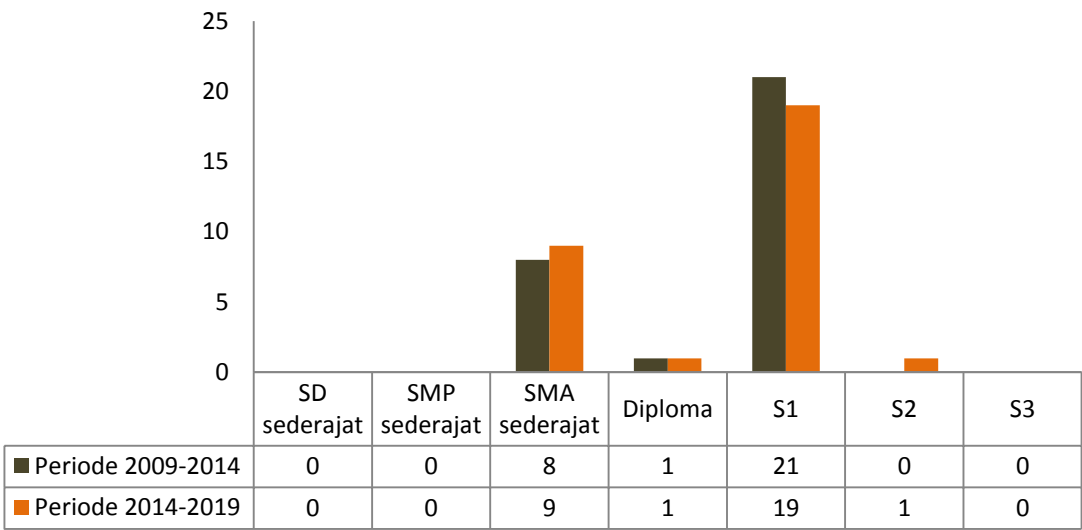


Sumber : <http://www.index.ti.or.id/>, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

- **Pemerintahan elektronik atau e-government** adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan (Sumber : id.wikipedia.org). Pemeringkatan e-gov dilaksanakan oleh Kementrian Kominfo. Adapun penilaian dilakukan dengan memperhitungkan Kebijakan, Kelembagaan, Infrastruktur, Aplikasi dan Perencanaan. Untuk Kota Banda Aceh pada tahun 2014 berada pada nilai 2,3 dengan kategori “kurang”, dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 2,6 dengan kategori “baik”, di atas Kota Batam dan Jambi. Sementara nilai Indeks e-gov Provinsi Aceh sejak Tahun 2012-2015 selalu berada dalam kategori “baik”.Saat ini Pemerintah Kota Banda Aceh telah memiliki 77 layanan aplikasi yang dapat diakses pada portal layanan Banda Aceh <http://layanan.bandaacehkota.go.id>.
- Indeks Persepsi Korupsi Indonesia adalah sebuah instrumen pengukuran tingkat korupsi kota-kota di seluruh Indonesia yang dikembangkan oleh Transparency International Indonesia. IPK Indonesia merupakan hasil survei kuantitatif terhadap pelaku bisnis. Rentang indeks IPK Indonesia adalah 0 sampai dengan 10, 0 berarti dipersepsikan sangat korup, 10 sangat bersih. Pada tahun 2008, Kota Banda Aceh menempati posisi ke-3 dari 50 kab/kota yang disurvei dengan nilai IPK 6,1, akan tetapi pada tahun 2010 posisi ini menurun drastis menjadi posisi ke-33 dari 50 kab/kota yang disurvei dengan nilai 4,61 dibawah Lhokseumawe, Pematang Siantar, dan Ambon. Untuk Tahun 2015, Kota Banda Aceh tidak termasuk dalam kab/kota yang disurvei oleh Transparency International Indonesia.

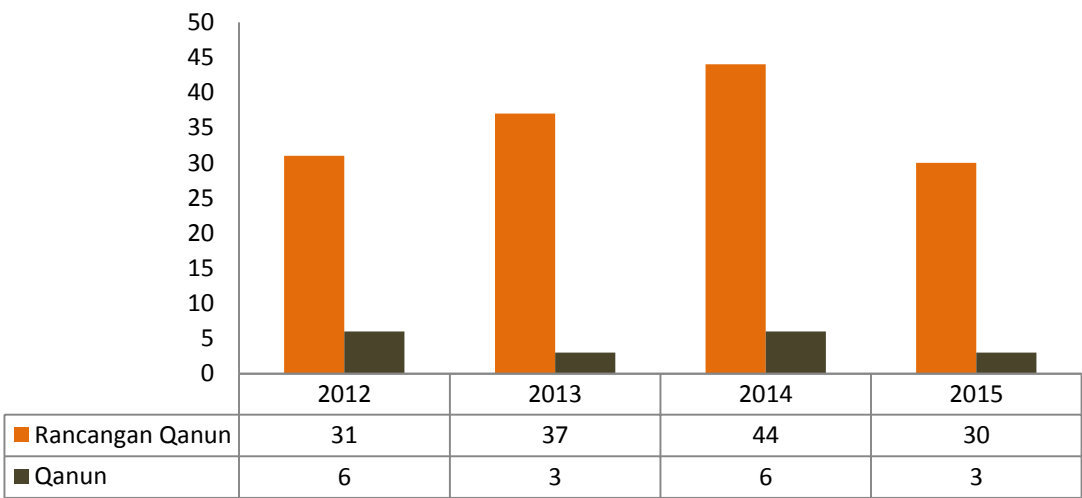
Indeks e-gov untuk Kota Banda Aceh pada tahun 2014 berada pada nilai 2,3 dengan kategori “kurang”, dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 2,6 dengan kategori “baik”, berada di atas Kota Batam dan Jambi

Gambar 2.2.5 Anggota DPRK Banda Aceh Periode 2009-2014 dan 2014-2019 berdasarkan Pendidikan Terakhir pada saat pelantikan



Sumber : Sekretariat DPRK Banda Aceh,2014

Gambar 2.2.6 Perbandingan Jumlah Rancangan Qanun yang diajukan dan Qanun yang disahkan oleh DPRK Banda Aceh Tahun 2012-2015

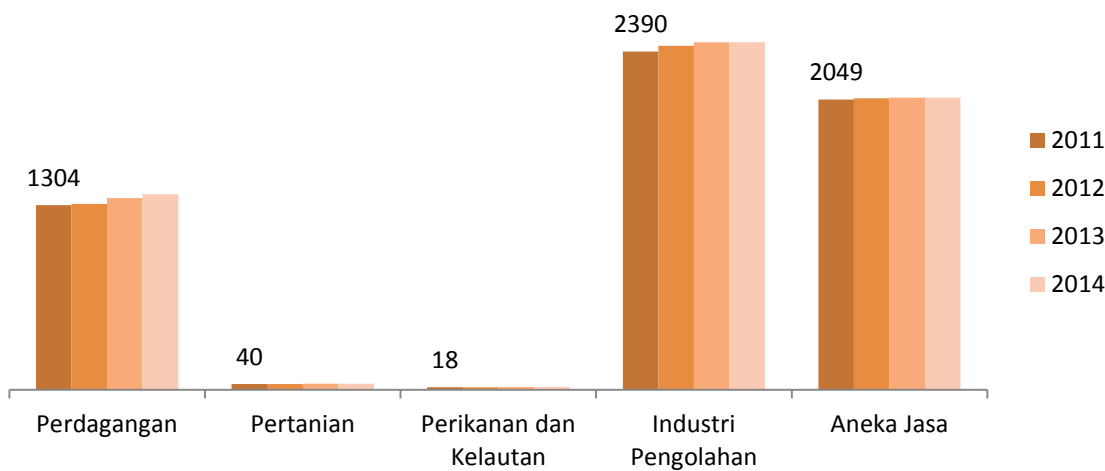


Sumber : <http://jdih.bandaacehkota.go.id> Tahun 2016

- Umur Anggota DPRK Banda Aceh pada saat pelantikan untuk kedua periode 2009-2014 dan 2014-2019 didominasi pada kelompok usia 41-50 tahun, yaitu 15 orang periode 2009-2014 dan 14 orang periode 2014-2019, diikuti dengan umur 31-40 tahun, yaitu 8 orang periode 2009-2014 dan 11 orang periode 2014-2019
- Secara kuantitas, jumlah Qanun yang disahkan oleh DPRK Banda Aceh masih minim, hal ini dapat dilihat dari Gambar Perbandingan Jumlah Rancangan Qanun yang diajukan dan Qanun yang disahkan oleh DPRK Banda Aceh Tahun 2012-2015 di atas, dimana pada Tahun 2012 dari 31 Rancangan Qanun yang diajukan hanya 6 Qanun yang berhasil disahkan atau 19%, bahkan pada Tahun 2015 dari 30 rancangan qanun yang diajukan hanya 10% atau 3 qanun yang disahkan oleh DPRK Banda Aceh.

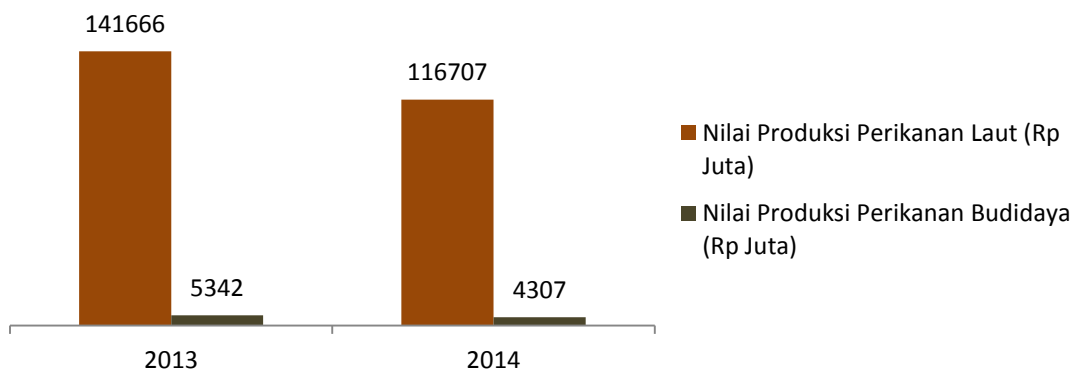
(Rp 28,6M) 5,3%
dari total Belanja Langsung APBK Banda Aceh T.A 2015

Gambar2.3.1 Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Banda Aceh Tahun 2011-2014



Sumber : Statistik Daerah Kota Banda Aceh 2015

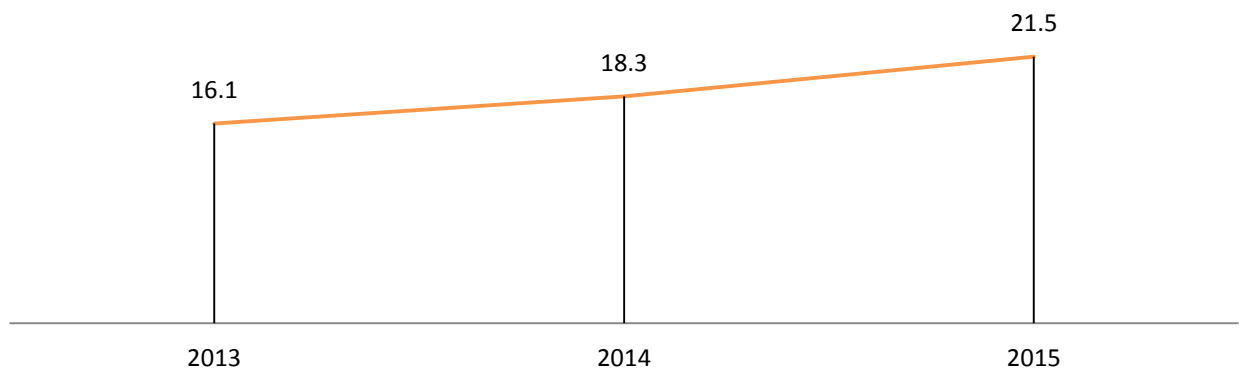
Gambar 2.3.2 Nilai Produksi Usaha Perikanan di Kota Banda Aceh Tahun 2013-2014



Sumber : Statistik Daerah Kota Banda Aceh 2015

- Meskipun secara keseluruhan jumlah UKM di Kota Banda Aceh meningkat, akan tetapi tidak ada perkembangan yang signifikan dari Tahun 2010, 5324 UKM menjadi 5962 pada Tahun 2014. Keberadaan UKM adalah merupakan salah satu pendorong perekonomian Kota Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh telah memfasilitasi akses perbankan (Bank Aceh dan Bukopin) dan lembaga penjaminan kredit daerah untuk mengatasi permasalahan penguatan modal bagi para pelaku UKM.
- Nilai Produksi Perikanan Laut dan Budidaya mengalami penurunan dari Tahun 2013, Rp 141,6 Milyar (produksi : 7.083 ton) menjadi 116,7 Milyar (produksi : 6.614,2 ton) pada Tahun 2014. Hal yang sama juga terjadi pada Nilai Produksi Perikanan Budidaya (Udang dan Bandeng) dari Tahun 2013 sebesar Rp 5,3 M (produksi : 154,3 ton) menjadi Rp 4,3 M (produksi : 439,76 ton).

Gambar 2.3.3 Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional di Kota Banda Aceh
Tahun 2013-2015 (milyar)



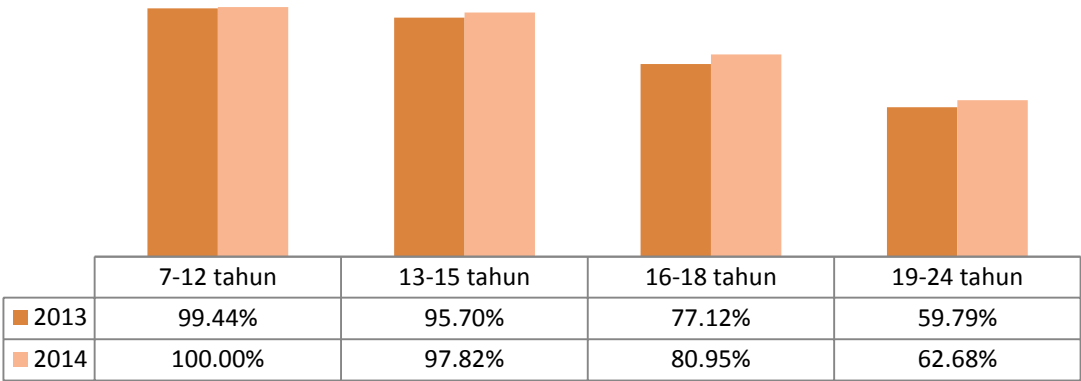
Sumber : KPPTSP Kota Banda Aceh, 2016

- Semakin tinggi Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN) maka semakin menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan. Di Kota Banda Aceh nilai PMDN terus meningkat, yakni pada Tahun 2015 21,5 Milyar, yang terdiri dari 2 sektor usaha yaitu PT. Nusantara Oilindo Pratama (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI) dan PT. Kembang Mutiara (Perdagangan Besar atas Balas Jasa (FEE), sebagai penyalur alat kesehatan dan Tahun 2013, 16,1 Milyar. Adanya peraturan pemerintah pusat yang mengatur bahwa investasi yang bernilai 1 s/d 10 Milyar dikeluarkan izin prinsipnya di Kabupaten/Kota, sementara untuk 10 milyar ke atas dilakukan di Provinsi, menyebabkan terbatasnya data yang disajikan padahal dominan investor di Kota Banda Aceh berinvestasi dengan modal diatas 10 milyar.

(Rp 62,1M) 11,6%

dari total Belanja Langsung APBK Banda Aceh T.A 2015

Gambar 2.4.1 Persentase Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur Sekolah di Kota Banda Aceh Tahun 2013-2014



Sumber : Statistik Daerah Kota Banda Aceh 2015

Gambar 2.4.2 Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah dan Putus Sekolah Kota Banda Aceh 2011-2015

	2011	2012	2013	2014	2015
Angka Melek Huruf	99.71	99.97	100	100	100
Angka Rata-rata Lama Sekolah	12.00	12.07	12.19	12.37	12.60
Angka Putus Sekolah	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh, 2016

- Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk Kota Banda Aceh, akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari angka partisipasi sekolah yang telah mencapai 100 % pada tahun 2014 untuk umur 7-12 tahun (SD sederajat). Sementara untuk umur 13-15 tahun (SMP sederajat) mencapai 97,82%, dan 16-18 tahun (SMA sederajat) mencapai 80,95%. Sedangkan untuk akses terhadap perguruan tinggi bagi penduduk umur 19-24 tahun sudah mencapai 62,68% pada Tahun 2014.
- Kualitas pendidikan di Kota Banda Aceh telah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari tidak ada lagi masyarakat yang buta huruf sejak Tahun 2013 (Angka Melek Huruf 100%), tidak ada lagi anak usia sekolah yang tidak dapat bersekolah (Angka Putus Sekolah 0) dan tingginya angka rata-rata lama sekolah (Tahun 2015 : 12.6, baca : 12 Tahun 6 bulan)

Fasilitas Pendidikan di Kota Banda Aceh Tahun 2014 :

- 87 TK
- 83 SD/MI
- 31 SMP/MTs
- 38 SMA/MA/SMK

(Rp 86,3M) 16,1%

dari total Belanja Langsung APBK Banda Aceh T.A 2015

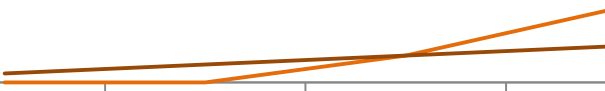
Gambar 2.5.1 Jumlah Kunjungan Pasien Askes, Umum, Jamkesmas dan JKA di Kota Banda Aceh Tahun 2011-2014



	2011	2012	2013	2014
Askes	73767	70074	60434	67564
Umum	11202	3184	12954	1300
Jamkesmas	81331	77142	59474	50593
JKA	186084	202514	212853	201362

Sumber : Statistik Daerah Kota Banda Aceh 2015

Gambar2.5.2 Jumlah Puskesmas yang sudah menerapkan e-health dan jumlah Puskesmas yang bersertifikasi ISO/akreditasi di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2015



	2012	2013	2014	2015
Puskesmas e-health	0	0	3	8
Puskesmas ISO	1	2	3	4

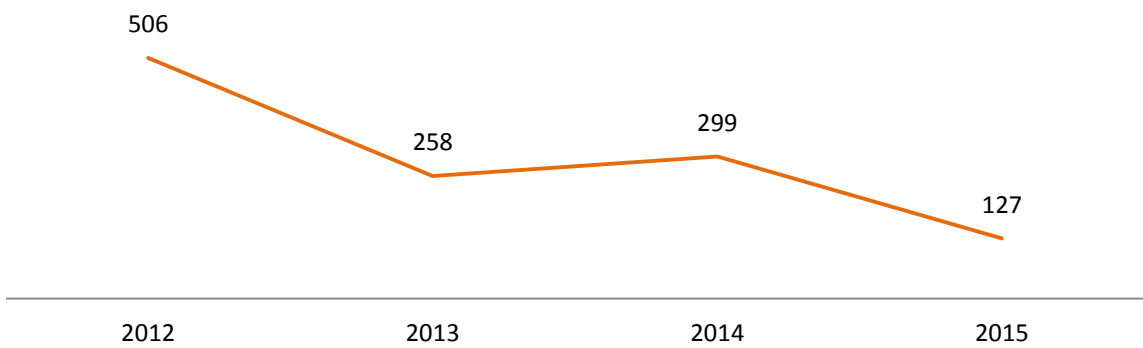
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2016

- Fasilitas kesehatan di Kota Banda Aceh telah cukup memadai, hal ini dapat dilihat dari tingginya antusiasme masyarakat dari tahun ke tahun dalam memanfaatkan berbagai fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah. Pada tahun 2011 jumlah kunjungan pasien di Kota Banda Aceh mencapai 352.384 orang, yang didominasi oleh Pasien JKA sebanyak 186.084 orang (52%) dan pada Tahun 2014 jumlah pasien mencapai 320.819 orang dan masih didominasi oleh Pasien JKA sebanyak 201.362 orang (62%).
- Sebagai salah satu wujud dalam peningkatan pelayanan kesehatan, maka Puskesmas sebagai ujung tombak penyelenggara upaya kesehatan, harus mampu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan serta penyediaan informasi kesehatan bagi masyarakat, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemko Banda Aceh adalah dengan penerapan e-health dan sertifikasi ISO/Akreditasi bagi seluruh Puskesmas di Kota Banda Aceh yang berjumlah 11 Puskesmas. Dimulai sejak tahun 2013 Pemerintah Kota Banda Aceh telah merintis pembangunan jaringan e-health dan saat ini 8 puskesmas telah menerapkan e-health, dan seluruh jaringan e-health puskesmas telah terkoneksi langsung ke Dinas Kesehatan. ISO 9001: 2008 adalah sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengontrol organisasi berkaitan dengan mutu. Pada tahun 2015 Puskesmas Banda Raya berhasil meraih sertifikasi ISO, mengikuti 3 puskesmas lainnya yaitu Puskesmas Kopelma Darussalam (tahun 2012), Puskesmas Baiturrahman (2013), Puskesmas Kuta Alam (2014).

Fasilitas Kesehatan di Kota Banda Aceh Tahun 2015 :

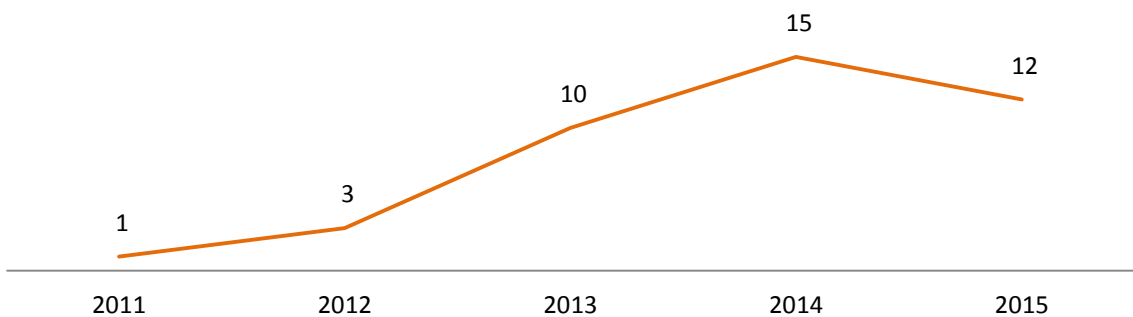
- 14 Rumah Sakit Umum+Swasta
- 11 Puskesmas
- 26 Puskesmas Pembantu
- 21 Puskesmas Keliling
- 113 Posyandu
- 33 Klinik/Balai Kesehatan
- 21 Puskesmas Keliling

Gambar2.4.3 Jumlah Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Banda Aceh pada Tahun 2012-2015



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2016

Gambar2.4.6 Jumlah kasus HIV-AIDS di Kota BandaAceh Tahun 2009-2013

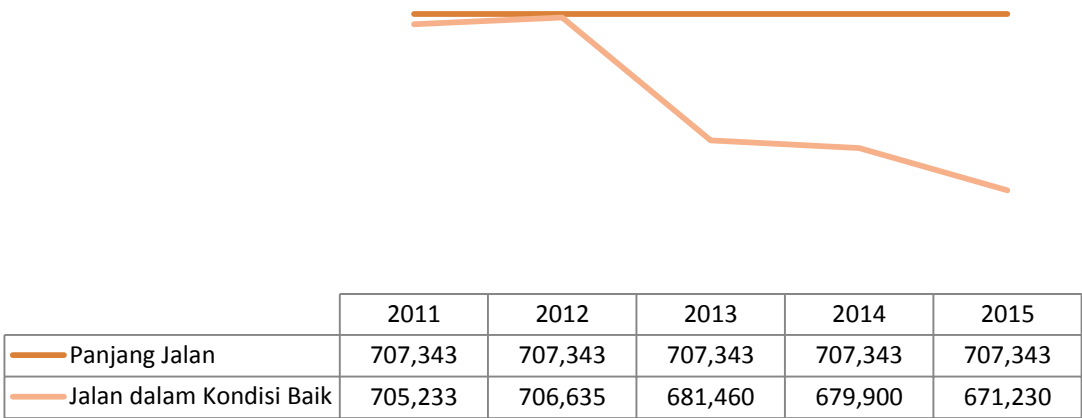


Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2016

- Kota Banda Aceh sebagai daerah perkotaan, memiliki kepadatan dan mobilitas masyarakat yang tinggi serta pembangunan yang intensif. Factor-faktor tersebut membuat masih ditemukannya sejumlah kasus DBD di Kota Banda aceh. Pada tahun 2012 ditemukan 506 kasus DBD, akan tetapi karena berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan didukung oleh masyarakat sehingga angka ini cenderung menurun hingga 127 kasus DBD pada Tahun 2015.
- Jumlah kasus HIV/AIDS mengalami peningkatan yang cukup tajam, dari 1 kasus pada tahun 2011 menjadi 15 kasus pada tahun 2014, meskipun mengalami penurunan menjadi 12 kasus pada Tahun 2015, angka ini cukup mengkhawatirkan mengingat Kota Banda Aceh adalah Kota yang menerapkan Syariat Islam.

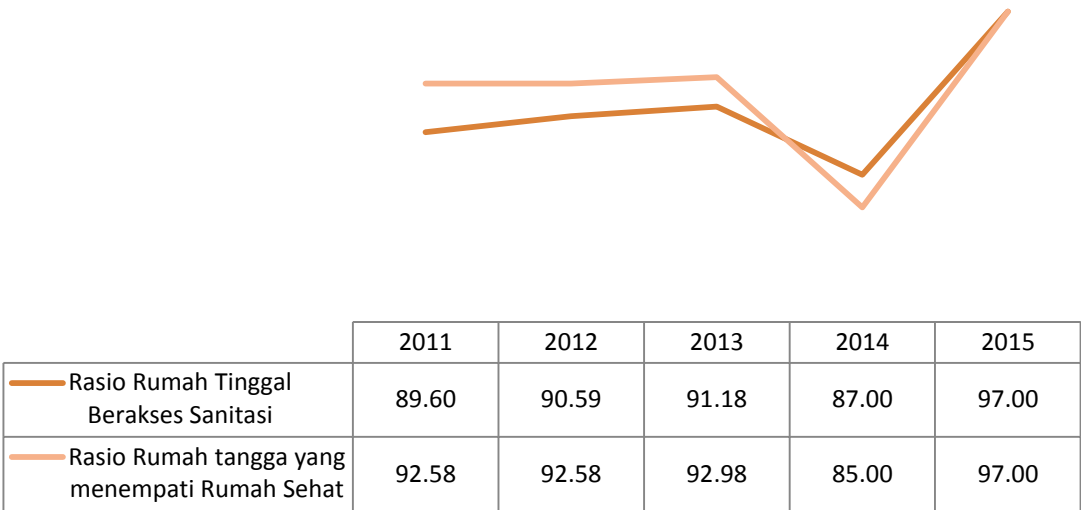


Gambar 2.6.1 Panjang Jalan Kota dan Perkembangan Jalan dalam Kondisi Baik Kota Banda Aceh Tahun 2011-2015



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh, 2016

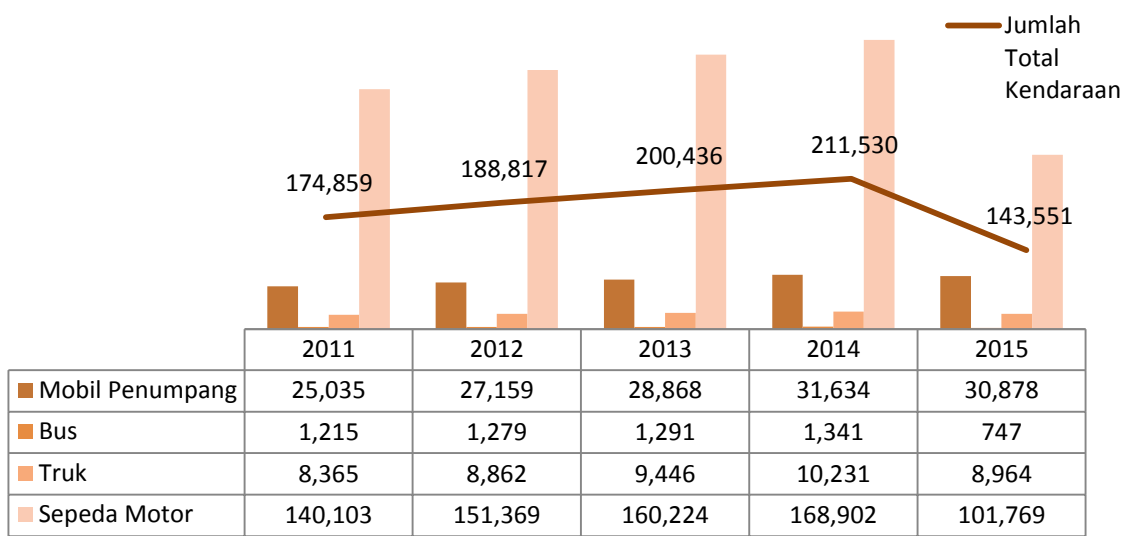
Gambar 2.6.2 Rasio Rumah Tinggal berakses sanitasi dan Rumah Tangga yang menempati Rumah Sehat Kota Banda Aceh Tahun 2009-2013



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh, 2016

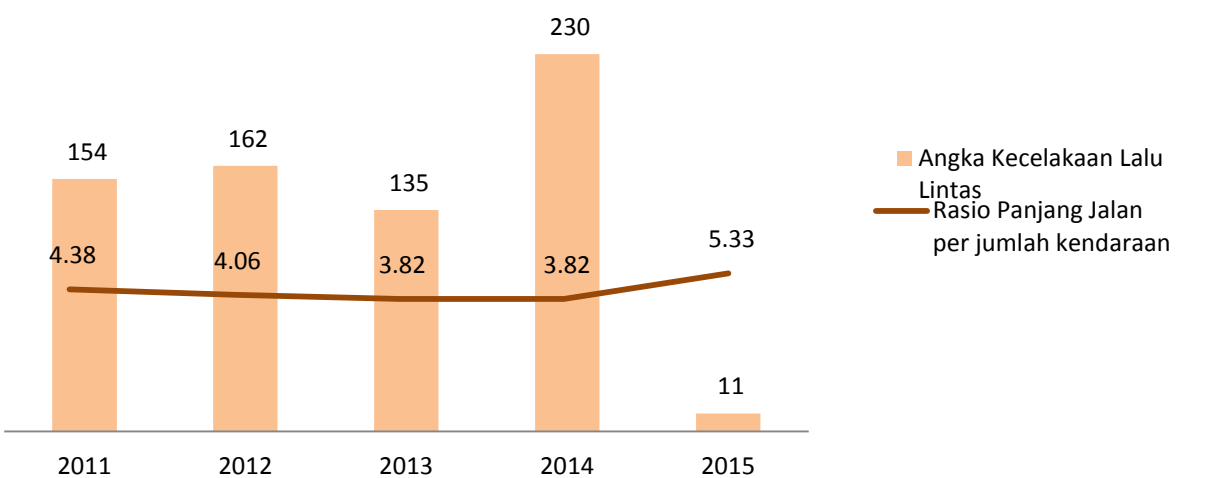
- Persentase panjang jalan dalam kondisi baik di Kota Banda Aceh selalu berada di atas 90%, meskipun terjadi penurunan dimana pada Tahun 2011 persentase panjang jalan dalam kondisi baik mencapai 705.233 km (99,7%), dan menurun menjadi 671.230 km (94,8%) di Tahun 2015.
- Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, seperti fasilitas air bersih, pembuangan tinja, pembuangan air limbah (air bekas) dan pembuangan sampah. Kesadaran masyarakat Kota Banda Aceh akan pentingnya rumah tinggal yang berakses sanitasi dan sehat sudah baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya rasio rumah tinggal berakses sanitasi (97,00%) dan rasio rumah tangga yang menempati rumah sehat (97,00%) pada Tahun 2015.

Gambar 2.6.3 Jumlah Total Kendaraan dan Data Kendaraan di Kota Banda Aceh Tahun 2011-2015



Sumber : Laporan Akhir Tahun Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Banda Aceh Tahun 2015

Gambar 2.6.4 Rasio panjang Jalan per Jumlah Kendaraan dan Angka Kecelakaan Lalu Lintas Kota Banda Aceh Tahun 2009-2013

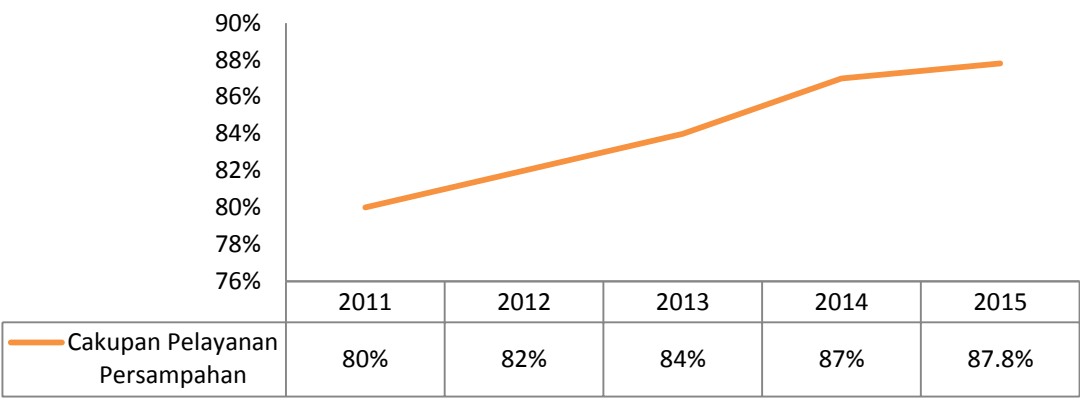


Sumber : Laporan Akhir Tahun Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Banda Aceh Tahun 2015

- Jumlah total kendaraan di Kota Banda Aceh mencapai 211.530 unit di Tahun 2014, akan tetapi mengalami penurunan sebanyak 67.979 unit di tahun 2015. Sepeda motor roda dua dan tiga masih mendominasi kendaraan di Kota Banda Aceh (80%)
- Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Banda Aceh meningkat dari 4,38 di Tahun 2014 menjadi lebih baik pada tahun 2015, yakni 5,33. Hal ini tentunya menunjang untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, yang menjadi hanya 11 kasus di Tahun 2015 jauh menurun dibandingkan Tahun 2014 yang mencapai 230 kasus.

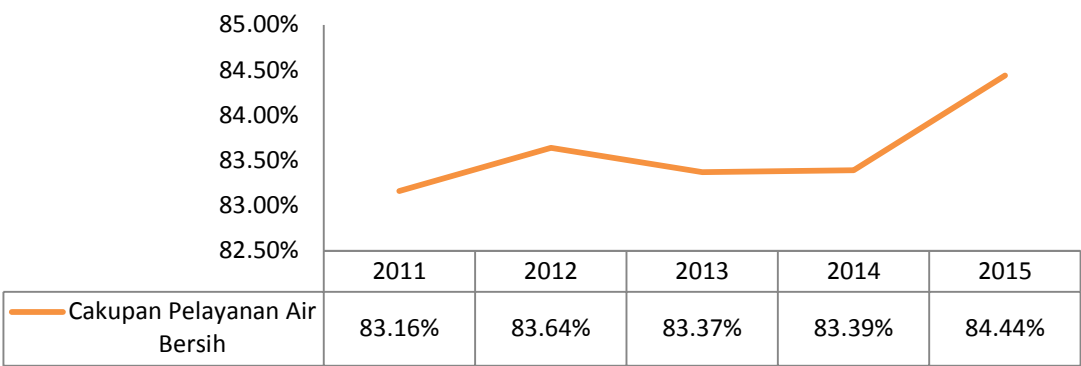
“Jumlah Kendaraan Tahun 2014 : 211.530 unit dan jumlah penduduk 249.499 jiwa, maka perbandingan kepemilikan kendaraan untuk penduduk Kota Banda Aceh adalah hampir setiap 1 orang penduduk memiliki 1 kendaraan bermotor”

Gambar 2.6.5 Cakupan Pelayanan Persampahan (persentase penduduk terlayani) Kota Banda Aceh 2011-2015



Sumber : Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh, 2016

Gambar 2.6.6 Cakupan Pelayanan Air Bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh 2011-2015

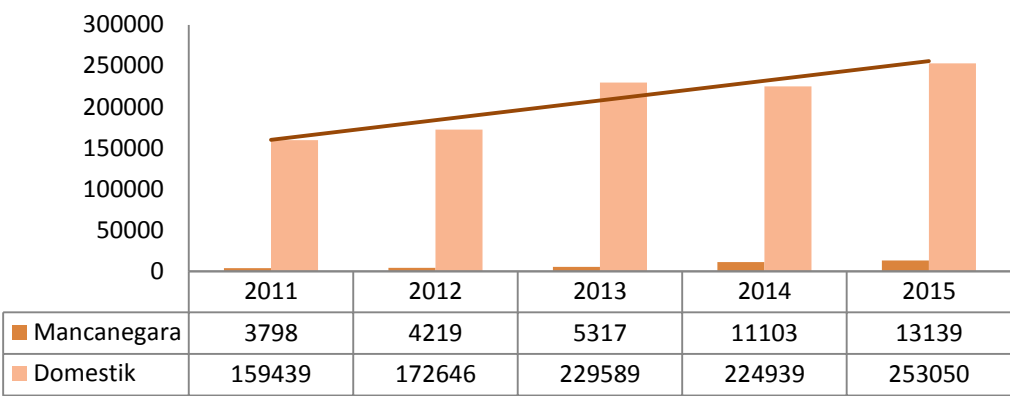


Sumber : KSP SPAM Kota Banda Aceh 2015-2019 dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh, 2016

- Timbulan sampah semakin meningkat setiap tahunnya dikarenakan faktor pertumbuhan jumlah penduduk. Volume sampah rata-rata yang dihasilkan sekarang sebesar 180 ton/hari (720 m3/hari). Sedangkan rata-rata sampah yang terangkut ke TPA sebesar 158 Ton/ hari. Cakupan pelayanan persampahan bagi masyarakat Kota Banda Aceh sampai tahun 2015 telah mencapai 87,80% dari total penduduk. Artinya sebanyak 219.070 penduduk telah terlayani pengangkutan sampah. Secara nasional pencapaian tingkat pelayanan persampahan di Kota Banda Aceh lebih tinggi dari tingkat pelayanan persampahan secara nasional yang ditargetkan sebesar ± 40%.
- Meskipun tingkat kebocoran (*waterloss*) air bersih masih cukup tinggi (46% pada Tahun 2014) akan tetapi cakupan pelayanan Air Bersih terus meningkat setiap tahunnya. Sampai tahun 2015 jumlah penduduk yang telah berakses air bersih mencapai 84,44% dari total jumlah penduduk Kota Banda Aceh.

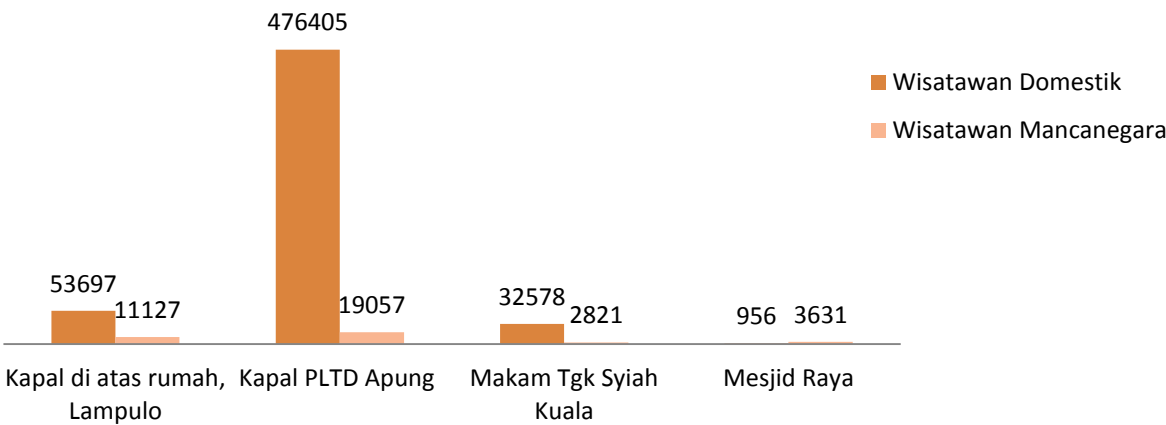
Kota Banda Aceh pada tahun 2015 gagal mendapatkan Adipura, yang sebelumnya telah diperoleh Pemko Banda Aceh delapan kali berturut-turut. Dari seluruh item yang masuk kategori penilaian, Kota Banda Aceh kurang pada penilaian tempat pembuangan akhir (TPA). Hal ini disebabkan pada saat dilakukan penilaian sedang dilakukan pembangunan jalan akses tanjakan TPA dan adanya pemasangan jaringan pengumpulan gas methan.

Gambar 2.7.1 Jumlah Hunian Wisata Mancanegara dan Domestik Kota Banda Aceh Tahun 2011-2015



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh, 2016

Gambar 2.7.2 Banyaknya Kunjungan Wisatawan di Objek Pariwisata yang paling di kunjungi di Kota Banda Aceh Tahun 2014

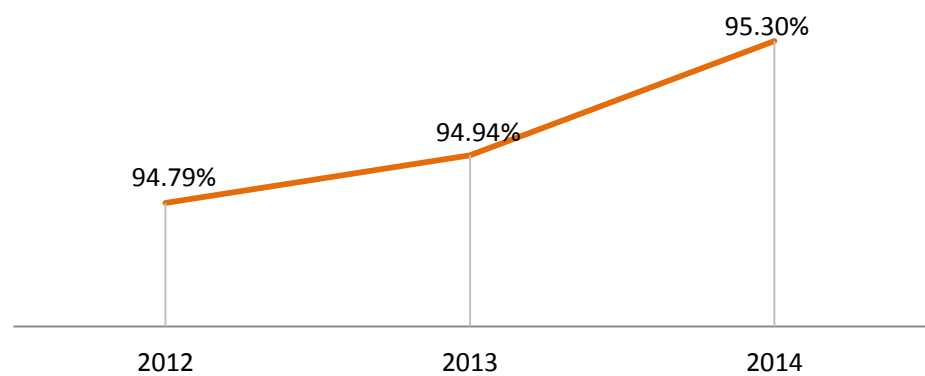


Sumber : Statistik Daerah Kota Banda Aceh, 2015

- Perkembangan pariwisata di Kota Banda Aceh menunjukkan capaian yang menggembirakan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Tingkat kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara yang diperoleh dari data hunian Hotel/wisma/losmen/penginapan yang ada dalam wilayah Kota Banda Aceh menunjukkan trend kenaikan dari tahun ke tahun. Konsep wisata religi menjadi prioritas yang ditawarkan Kota Banda Aceh selain keunikan budaya dan wisata alam. Di tahun 2011, jumlah wisatawan sebanyak 163237 orang meningkat menjadi 266.189 orang di tahun 2015. Wisatawan masih didominasi turis domestik, sedangkan dari luar negeri umumnya berasal dari Malaysia.
- Objek Wisata Kapal PLTD Apung merupakan objek wisata yang paling diminati di Kota Banda Aceh oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Tahun 2014 sebanyak 495.462 orang mengunjungi objek wisata tersebut, diikuti dengan Kapal di atas Rumah, Lampulo sebanyak 64.824 orang.

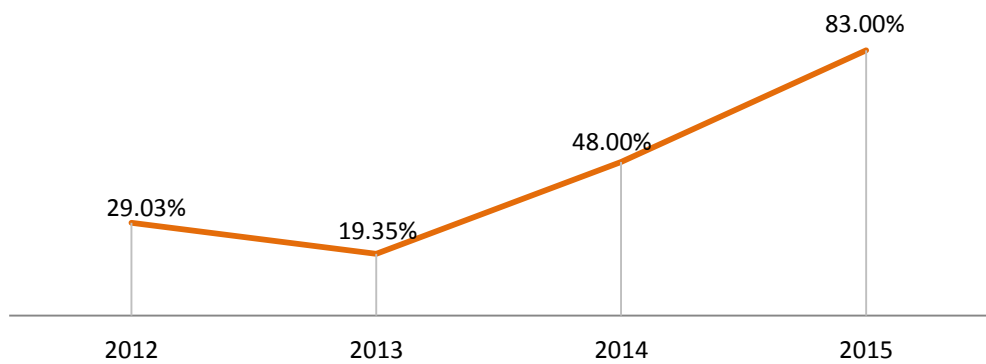
0,3% (Rp 1,5 M)
dari total Belanja Langsung APBK Banda Aceh T.A 2015

Gambar 2.8.1 Indeks Pembangunan Gender Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014



Sumber : Buku “Indeks Pembangunan Gender 2014” Badan Pusat Statistik Indonesia, 2015

Gambar 2.8.2 Tercapainya 31 Indikator Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh



Sumber : Kantor Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana, 2016

- Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah ukuran pembangunan manusia berbasis gender dilihat dari tiga dimensi capaian dasar manusia yaitu dimensi panjang umur dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Ketika Angka IPG semakin mendekati 100, maka pembangunan gender semakin seimbang dan merata. Berdasarkan Buku “Indeks Pembangunan Gender 2014” dari Badan Pusat Statistik, angka IPG Kota Banda Aceh pada Tahun 2014 (95.30%) lebih tinggi dari Provinsi Aceh (IPG : 91,50) dan Nasional (IPG:90,34)
- Sejak tahun 2013 Kota Banda Aceh telah ditetapkan sebagai Pilot Project Kota Layak Anak (KLA) yang dimaksudkan untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak di dalam kebijakan program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Terdapat 31 indikator KLA, dan ditargetkan dapat terpenuhi di Tahun 2017, hingga tahun 2015 telah 26 indikator KLA yang tercapai

3.1 TINGKAT NASIONAL & INTERNASIONAL

1. Anugerah ICT Pura Kategori Utama (2011)
2. Innovative Government Awards (2011, 2012)
3. Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (2011,2012,2013,2014,2015)
4. Penghargaan LAKIP Tepat Waktu 2011,2012)
5. Anugerah Piala Adipura (2012,2013,2014)
6. Anugerah Wahana Tata Nugraha (2011,2012,2013,2014)
7. LPSE berprestasi kategori Motivator (2011)
8. Juara I Nasional PKPD-PU Bidang Penataan Ruang (2011)
9. Juara II Nasional PKPD-PU Bidang Bina Marga (2011)
10. Inovasi MUSRENA menjadi Best Practice-APEKSI (2011)
11. Salah satu dari 3 kota yang diundang PBB untuk mempresentasikan Disaster Risk Reduction (2011)
12. Salah satu dari 60 kab/kota di Indonesia utk program Green Cities (2011)
13. Masuk kategori “CukupPartisipatif” dalam pengelolaan Keuangan Daerah – Survei USAID (2012)
14. Kota yang “Cukup Responsif Gender” – Survei FITRA (2012)
15. Piala Adiwiyata (2012,2014)
16. Pelayanan Publik Kemudahan dalam Berusaha (2012)
17. Penghargaan di bidang Pariwisata (2012)
18. Anugerah KIHAJAR (2012,2014,2015)
19. Piala Indonesia Digital Society Award (IDSA) kategori Overall, Juara II (2013)
20. Piala Indonesia Digital Society Award (IDSA) kategori Community, Juara III (2013)
21. Piala Wahana Tata Nugraha (2013)
22. Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian dari kementrian keuangan, diserahkan oleh Wapres (2012, 2014)
23. Juara III Nasional Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah bidang Pekerjaan Umum (PKPD-PU) Bidang Penataan Ruang dari Kementrian PU (2013)
24. Penghargaan Langit Biru kategori kota sedang/kecil dari Menteri Lingkungan Hidup (2013)
25. Penghargaan Kepatuhan Pelayan Publik oleh Ombudsman RI (2014)
26. Best Champion Indonesia Digital Society Award (IDSA) kategori Overall (2014)
27. Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Terbaik (2014)
28. Anugerah Media Humas (AMH) 2014.
29. Penghargaan Juara I BKN Award 2015 untuk ketegori Inovatif se-Indonesia dari BKN RI (2015)
30. Prediksi Gold versi Kota terbaik Indonesia’s Attractiveness Award (IAA) dari Tempo Media Group dan Frontier Consulting Group (2015)
31. AMPL Awards dari Kementerian PPN/Bappenas, Kategori Inovasi Layanan Sampah berbasis website (2015)
32. Penghargaan Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP) dari Kemendagri RI (2015)
33. TOP Eksekutif Muslimah, kategori Tokoh Pemerintahan dari Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (2015)
34. KABTA Awards, kategori website pemerintah terfavorit pilihan pembaca dari Berita Satu.com (2015)

3.2 TINGKAT PROPINSI

1. Piagam Penghargaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota sebagai Peringkat ke – 1 dari Gubernur Aceh (2012)
2. Nilai UN Tertinggi Tk. Provinsi SMA/K dengan kelulusan 99,76% (2012)
3. Piala Juara Umum Hardikda Bidang Pembangunan Pendidikan, oleh Pemerintah Aceh (2013)
4. Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award dari Komisi Informasi Aceh (2013)
5. Juara I Anugerah Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Aceh (2014)

